



BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN BESARAN DAN PEDOMAN PELAKSANAAN
ALOKASI DANA GAMPONG UNTUK SETIAP GAMPONG DALAM
KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran dan Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Gampong untuk Setiap Gampong dalam Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

3/8/25

- dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 12. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 42);
 13. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 58);
 14. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2024 Nomor 6);

u X P

15. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dalam Kabupaten Aceh Jaya (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2012 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dalam Kabupaten Aceh Jaya (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2013 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 41 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Taman Pendidikan Al-Qur'an, Balee Seumeubeut dan Dayah dalam Kabupaten Aceh Jaya (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014 Nomor 41);
17. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan di Gampong (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2015 Nomor 44);
18. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 109 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018 Nomor 109);
19. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019 Nomor 6);
20. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2025 (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2024 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN DAN PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA GAMPONG DARI DANA PERIMBANGAN SETIAP GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.



3. Bupati Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Camat adalah Pemimpin dan Koordinator Penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
5. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
6. Pemerintahan Gampong adalah Keuchik dan Tuha Peut yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Gampong.
7. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, Sekretaris Gampong beserta Perangkat Gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Gampong.
8. Keuchik adalah pimpinan suatu Gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
9. Tuha Peut adalah unsur Pemerintahan Gampong yang berfungsi sebagai Badan Permusyawaratan Gampong.
10. Jumlah Gampong adalah jumlah yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, dan ditetapkan dalam Qanun Kabupaten.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, APBK, Pendapatan Asli Gampong dan Sumber lainnya yang sah, dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut yang ditetapkan dengan Qanun Gampong.
13. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
14. Rekening Kas Gampong yang selanjutnya disingkat RKG adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Gampong yang menampung seluruh penerimaan Gampong dan untuk membayar seluruh pengeluaran Gampong pada bank yang ditetapkan.

15. Alokasi Dana Gampong yang selanjutnya disingkat ADG adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam APBK setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang dialokasikan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong, yang selanjutnya disingkat RPJMG adalah rencana pembangunan Gampong untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Gampong yang selanjutnya disingkat RKPG adalah penjabaran dari RPJMG untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
18. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Gampong yang selanjutnya disingkat PTPKG adalah unsur perangkat Gampong yang membantu Keuchik untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Gampong.
19. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah lembaga pendidikan yang ada di tingkat Gampong.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN ADG

Pasal 2

ADG dimaksudkan untuk membiayai Program Pemerintahan Gampong dalam melaksanakan kegiatan Pemerintahan, Pembinaan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat serta kegiatan Kemasyarakatan lainnya.

Pasal 3

Tujuan ADG adalah:

- a. meningkatkan kapasitas Pemerintahan Gampong dan kemampuan kelembagaan Gampong dalam membantu program pembangunan secara mandiri dengan memberdayakan sumber daya manusia dan sumber daya alam secara optimal untuk kepentingan masyarakat;
- b. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; dan
- c. meningkatkan kemandirian Gampong.

BAB III

PRINSIP PENGELOLAAN ADG

Pasal 4

- (1) Pengelolaan ADG merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Gampong dalam APBG.
- (2) Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADG direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Gampong.
- (3) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
- (4) ADG dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

4 Ap

BAB IV
PELAKSANAAN ADG

Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan ADG harus berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Pengelolaan ADG berdasarkan asas transparan, akuntabel dan partisipatif.
- (3) Pelaksanaan ADG harus mengacu pada RPJMG dan RKPG masing-masing Gampong.

BAB V
SASARAN ADG

Pasal 6

- (1) ADG diberikan secara langsung kepada 172 (seratus tujuh puluh dua) Gampong di Kabupaten melalui transfer dari RKUD ke RKG.
- (2) Penggunaan ADG dibagi menjadi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal.
- (3) ADG diprioritaskan untuk pemenuhan besaran Penghasilan tetap Keuchik, besaran penghasilan tetap Sekretaris Gampong, besaran penghasilan tetap perangkat lainnya dan Operasional Gampong sesuai kebutuhan masing-masing Gampong pada bidang penyelenggaraan Pemerintahan Gampong dan selebihnya dapat digunakan untuk bidang pembinaan kemasyarakatan Gampong, bidang pelaksanaan pembangunan Gampong dan bidang pemberdayaan masyarakat Gampong.

Pasal 7

- (1) Belanja pada bidang penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, yaitu:
 - a. penghasilan tetap dan tunjangan, meliputi belanja pegawai (penghasilan tetap Keuchik dan perangkat Gampong, tunjangan Keuchik dan perangkat Gampong);
 - b. operasional perkantoran, meliputi:
 - 1) belanja barang dan jasa (alat tulis kantor, dan lain-lain); dan
 - 2) belanja modal (printer, dan lain-lain).
 - c. operasional Kepala Dusun.
- (2) Belanja pegawai dibayarkan sesuai dengan jumlah perangkat Pemerintahan Gampong dan berpedoman pada standar biaya yang telah ditetapkan.
- (3) Belanja modal adalah belanja yang digunakan untuk pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.

4 AP

BAB VI
PENETAPAN BESARAN ADG DAN SUMBER DANA

Pasal 8

- (1) Total ADG Kabupaten Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp46.743.510.300,- (empat puluh enam miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu tiga ratus rupiah).
- (2) Jumlah ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp45.057.438.400,- (empat puluh lima miliar lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah); dan
 - b. Dana Bagi Hasil (DBH) Rp1.686.071.900,- (satu miliar enam ratus delapan puluh enam juta tujuh puluh satu ribu sembilan ratus rupiah).
- (3) Besaran dana tiap Gampong dihitung berdasarkan:
 - a. pemenuhan besaran Penghasilan tetap Keuchik, besaran penghasilan tetap Sekretaris Gampong dan besaran penghasilan tetap perangkat lainnya sesuai kebutuhan masing-masing Gampong dalam Kabupaten.
 - b. alokasi formula yaitu jumlah dana perimbangan untuk ADG, yang dihitung berdasarkan variabel utama (jumlah penduduk miskin, jumlah penduduk, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis Gampong) setelah dilakukan Pemenuhan besaran Penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
 - c. Rumus perhitungan alokasi formula adalah sebagai berikut:
$$ADG = \{(0,50 * Z1) + (0,15 * Z2) + (0,25 * Z3) + (0,10 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

ADG = Alokasi Dana Gampong setiap Gampong

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Gampong terhadap total penduduk Kabupaten

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Gampong terhadap total penduduk miskin Kabupaten

Z3 = rasio luas wilayah setiap Gampong terhadap total luas wilayah Kabupaten

Z4 = rasio Indeks Kesulitan Geografis (IKG) setiap Gampong terhadap Indeks Kesulitan Geografis (IKG) Kabupaten

ADG = Alokasi Dana Gampong Kabupaten
 - d. Besaran ADG untuk setiap Gampong di Kabupaten Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Pemerintah Kabupaten mengalokasikan Alokasi Dana Gampong dalam APBK setiap Tahun Anggaran paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil yang

3 26 P

diterima oleh Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2025 tidak termasuk Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perkebunan Sawit dan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus.

BAB VII MEKANISME PENCAIRAN DANA ADG

Pasal 10

- (1) Pencairan ADG disalurkan melalui proses transfer dari RKUD ke RKG atas nama Keuchik dan Bendahara Gampong pada Bank yang ditunjuk.
- (2) Pencairan dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I paling cepat bulan Maret sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Juni sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - c. tahap III paling cepat bulan September sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
 - d. tahap IV paling cepat bulan November sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 11

- (1) Penyaluran ADG tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dilakukan setelah Keuchik menyampaikan:
 - a. Qanun Gampong mengenai APBG kepada Bupati;
 - b. laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBG tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. Keuchik menyampaikan Qanun Gampong dan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Maret.
- (2) Penyaluran ADG tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dilakukan setelah Keuchik menyampaikan:
 - a. laporan realisasi pelaksanaan APBG triwulan pertama kepada Bupati; dan
 - b. Keuchik menyampaikan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Juni.
- (3) Penyaluran ADG tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dilakukan setelah Keuchik menyampaikan:
 - a. laporan realisasi pelaksanaan APBG triwulan kedua kepada Bupati; dan
 - b. Keuchik menyampaikan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan September.
- (4) Penyaluran ADG tahap IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d dilakukan setelah Keuchik menyampaikan:
 - a. laporan realisasi pelaksanaan APBG triwulan ketiga kepada Bupati; dan



- b. Keuchik menyampaikan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan November.
- (5) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana mengeluarkan rekomendasi ADG setiap tahap penyaluran ke Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten.
 - (6) Bupati menunda penyaluran ADG dalam hal Keuchik tidak menyampaikan APBG dan/atau laporan realisasi pelaksanaan APBG triwulan sebelumnya.
 - (7) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBG dan/atau laporan realisasi pelaksanaan APBG tahun anggaran sebelumnya.
 - (8) Rincian ADG yang diterima Gampong setiap tahun dianggarkan dalam APBG.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kewenangan.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada Camat dan Tim Pembinaan Pemerintah Gampong sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 13

Masyarakat Gampong dapat melakukan pengawasan dan pemantauan mengenai pelaksanaan ADG dan melaporkan hasilnya kepada Tuha Peut dan/atau Camat untuk menindaklanjutinya.

Pasal 14

Tuha Peut melakukan pengawasan terhadap pelaksana kegiatan ADG dalam hal memberi saran dan masukan kepada Keuchik terhadap pelaksanaan kegiatan agar mengacu kepada kegiatan yang sudah ditetapkan.

Pasal 15

Apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam penggunaan ADG, akan dikenakan sanksi dan tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 16

- (1) Pelaporan dan pertanggungjawaban ADG terintegrasi dengan pelaporan dan pertanggungjawaban APBG.
- (2) Pengelolaan keuangan Gampong menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4 8 f

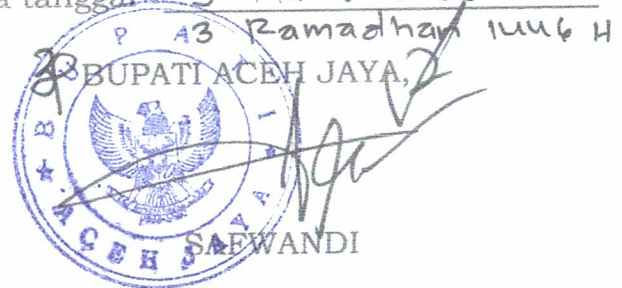
- (3) Keuchik menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Gampong setiap tahap penyaluran kepada Bupati melalui Camat untuk diteruskan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 3 Maret 2025 m



Diundangkan di Calang
pada tanggal 3 Maret 2025 m

3 Ramadhan 1446 H



BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2025 NOMOR 4

4 X P



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN BESARAN DAN PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA
GAMPONG DARI DANA PERIMBANGAN SETIAP GAMPONG DALAM
KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA GAMPONG	NAMA KECAMATAN	ADG DAU	ADG DBH	JUMLAH PAGU ADG PER- GAMPONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Keude Teunom	Teunom	264.423.709	9.894.867	274.318.576
2	Alue Ambang	Teunom	361.389.305	13.523.368	374.912.673
3	Padang Kleng	Teunom	333.511.657	12.480.173	345.991.830
4	Panton	Teunom	294.905.405	11.035.507	305.940.912
5	Pasi Tulak Bala	Teunom	211.461.718	7.913.003	219.374.721
6	Gampong Baro	Teunom	215.822.351	8.076.180	223.898.531
7	Rambong Payong	Teunom	210.507.636	7.877.301	218.384.937
8	Pasi Pawang	Teunom	219.818.327	8.225.711	228.044.038
9	Blang Baro	Teunom	218.726.433	8.184.852	226.911.285
10	Tanoh Anoe	Teunom	289.870.194	10.847.087	300.717.281
11	Tanoh Manyang	Teunom	376.806.125	14.100.273	390.906.398
12	Batee Roo	Teunom	241.970.735	9.054.666	251.025.401
13	Seuneubok Padang	Teunom	267.480.081	10.009.238	277.489.319
14	Seumira	Teunom	223.828.927	8.375.790	232.204.717
15	Kubu	Teunom	239.723.579	8.970.576	248.694.155
16	Alue Meuraksa	Teunom	243.351.444	9.106.332	252.457.776
17	Paya Baro	Teunom	275.052.060	10.292.585	285.344.645
18	Teupin Ara	Teunom	252.379.565	9.444.169	261.823.734
19	Cot Trap	Teunom	263.032.170	9.842.795	272.874.965
20	Leung Gayo	Teunom	265.081.316	9.919.475	275.000.791
21	Pasi Geulima	Teunom	235.483.840	8.811.923	244.295.763
22	Pasi Timon	Teunom	262.516.960	9.823.516	272.340.476
23	Bahagia	Krueng Sabee	265.162.418	9.922.510	275.084.928
24	Sentosa	Krueng Sabee	295.545.026	11.059.442	306.604.468
25	Dayah Baro	Krueng Sabee	397.634.106	14.879.667	412.513.773
26	Gampong Blang	Krueng Sabee	290.991.163	10.889.035	301.880.198
27	Keutapang	Krueng Sabee	437.672.729	16.377.932	454.050.661
28	Panton Makmur	Krueng Sabee	261.032.961	9.767.984	270.800.945
29	Keude Krueng Sabee	Krueng Sabee	300.857.617	11.258.242	312.115.859
30	Kabong	Krueng Sabee	298.324.496	11.163.451	309.487.947
31	Padang Datar	Krueng Sabee	325.478.697	12.179.575	337.658.272
32	Datar Luas	Krueng Sabee	315.315.254	11.799.254	327.114.508
33	Ranto Panyang	Krueng Sabee	238.646.264	8.930.262	247.576.526
34	Buntha	Krueng Sabee	307.435.908	11.504.405	318.940.313
35	Panggong	Krueng Sabee	325.192.721	12.168.874	337.361.595
36	Curek	Krueng Sabee	288.913.591	10.811.291	299.724.882
37	Alue Tho	Krueng Sabee	267.160.751	9.997.289	277.158.040
38	Mon Mata	Krueng Sabee	280.194.495	10.485.018	290.679.513
39	Paya Seumantok	Krueng Sabee	255.953.763	9.577.917	265.531.680
40	Sawang	Setia Bakti	320.644.994	11.998.696	332.643.690
41	Lhok Geulumpang	Setia Bakti	321.816.577	12.042.537	333.859.114
42	Padang	Setia Bakti	246.745.341	9.233.334	255.978.675
43	Gunong Meunasah	Setia Bakti	260.751.635	9.757.456	270.509.091
44	Sapek	Setia Bakti	338.105.809	12.652.088	350.757.897
45	Pante Kuyun	Setia Bakti	340.137.297	12.728.107	352.865.404
46	Glee Seubak	Setia Bakti	245.158.683	9.173.960	254.332.643
47	Gampong Baroh	Setia Bakti	319.626.450	11.960.581	331.587.031
48	Lhok Timon	Setia Bakti	342.636.285	12.821.621	355.457.906

4/8/25

NO	NAMA GAMPONG	NAMA KECAMATAN	ADG DAU	ADG DBH	JUMLAH PAGU ADG PER- GAMPONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
49	Gampong Baro	Setia Bakti	316.475.402	11.842.667	328.318.069
50	Lhok Buaya	Setia Bakti	318.671.610	11.924.851	330.596.461
51	Lhok Bot	Setia Bakti	294.979.782	11.038.291	306.018.073
52	Paya Laot	Setia Bakti	277.302.435	10.376.795	287.679.230
53	Lhok Kruet	Sampoiniet	316.350.564	11.837.996	328.188.560
54	Pulo Raya	Sampoiniet	235.193.830	8.801.070	243.994.900
55	Meunasah Kulam	Sampoiniet	237.682.314	8.894.191	246.576.505
56	Crak Mong	Sampoiniet	247.084.182	9.246.013	256.330.195
57	Alue Gro	Sampoiniet	243.098.199	9.096.856	252.195.055
58	Kuala Ligan	Sampoiniet	263.626.867	9.865.049	273.491.916
59	Babah Nipah	Sampoiniet	235.277.766	8.804.211	244.081.977
60	Jeumpheuk	Sampoiniet	274.514.583	10.272.473	284.787.056
61	Cot Langsat	Sampoiniet	236.743.142	8.859.046	245.602.188
62	Mata Ie	Sampoiniet	223.375.184	8.358.811	231.733.995
63	Blang Monlung	Sampoiniet	267.334.237	10.003.780	277.338.017
64	Krueng No	Sampoiniet	280.130.324	10.482.616	290.612.940
65	Seumantok	Sampoiniet	313.929.130	11.747.385	325.676.515
66	Ranto Sabon	Sampoiniet	260.379.386	9.743.526	270.122.912
67	Ligan	Sampoiniet	316.414.147	11.840.375	328.254.522
68	Ie Jeureungeh	Sampoiniet	246.448.445	9.222.224	255.670.669
69	Kuala Bakong	Sampoiniet	281.530.867	10.535.025	292.065.892
70	Cot Punti	Sampoiniet	252.964.596	9.466.061	262.430.657
71	Krueng Ayon	Sampoiniet	271.692.966	10.166.886	281.859.852
72	Pante Cermin	Jaya	311.314.997	11.649.563	322.964.560
73	Sabet	Jaya	304.448.473	11.392.614	315.841.087
74	Sango	Jaya	279.221.256	10.448.599	289.669.855
75	Mareu	Jaya	242.057.803	9.057.924	251.115.727
76	Lam Asan	Jaya	257.729.643	9.644.372	267.374.015
77	Alue Rayeuk	Jaya	242.163.053	9.061.862	251.224.915
78	Sapek	Jaya	312.253.882	11.684.696	323.938.578
79	Lambaroh	Jaya	232.224.695	8.689.964	240.914.659
80	Meudheun	Jaya	289.106.192	10.818.498	299.924.690
81	Babah Ie	Jaya	226.847.616	8.488.751	235.336.367
82	Ujong Sudheun	Jaya	210.894.657	7.891.788	218.786.445
83	Krueng Tunong	Jaya	251.532.863	9.412.485	260.945.348
84	Jambo Masi	Jaya	235.371.822	8.807.731	244.179.553
85	Lamtui	Jaya	258.236.725	9.663.347	267.900.072
86	Pasar Lamno	Jaya	197.523.450	7.391.426	204.914.876
87	Meunasah Weh	Jaya	279.218.165	10.448.483	289.666.648
88	Bak Paoh	Jaya	347.642.887	13.008.970	360.651.857
89	Babah Krueng	Jaya	243.337.405	9.105.807	252.443.212
90	Cot Dulang	Jaya	252.695.270	9.455.983	262.151.253
91	Lamdurian	Jaya	274.777.686	10.282.318	285.060.004
92	Putue	Jaya	216.309.636	8.094.414	224.404.050
93	Gle Putoh	Jaya	296.469.338	11.094.031	307.563.369
94	Pante Keutapang	Jaya	244.011.344	9.131.026	253.142.370
95	Lamme	Jaya	245.622.511	9.191.317	254.813.828
96	Meunasah Serba	Jaya	221.803.241	8.299.988	230.103.229
97	Leupe	Jaya	227.156.873	8.500.323	235.657.196
98	Meutara	Jaya	250.900.210	9.388.811	260.289.021
99	Lhuet	Jaya	300.059.676	11.228.383	311.288.059
100	Gle Jong	Jaya	213.633.909	7.994.287	221.628.196
101	Darat	Jaya	214.690.953	8.033.842	222.724.795
102	Gampong Baro	Jaya	226.585.985	8.478.961	235.064.946
103	Panton Makmur	Jaya	259.118.913	9.696.359	268.815.272

489

NO	NAMA GAMPONG	NAMA KECAMATAN	ADG DAU	ADG DBH	JUMLAH PAGU ADG PER- GAMPONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
104	Rumpet	Jaya	217.777.992	8.149.361	225.927.353
105	Nusa	Jaya	242.893.506	9.089.196	251.982.702
106	Keude Panga	Panga	281.835.638	10.546.430	292.382.068
107	Kuta Tuha	Panga	298.609.078	11.174.101	309.783.179
108	Tuwi Kareung	Panga	284.926.205	10.662.081	295.588.286
109	Ladang Baro	Panga	250.022.234	9.355.957	259.378.191
110	Panton Krueng	Panga	206.497.549	7.727.241	214.224.790
111	Gle Putoh	Panga	237.686.759	8.894.357	246.581.116
112	Alue Pande	Panga	289.438.522	10.830.934	300.269.456
113	Batee Meutudong	Panga	209.300.429	7.832.126	217.132.555
114	Gampong Harapan	Panga	231.256.818	8.653.745	239.910.563
115	Gunong Buloh	Panga	242.312.342	9.067.449	251.379.791
116	Gunong Meulinteung	Panga	215.005.374	8.045.608	223.050.982
117	Alue Abed	Panga	219.791.959	8.224.725	228.016.684
118	Gunong Mantok	Panga	225.711.615	8.446.241	234.157.856
119	Alue Raya	Panga	258.917.244	9.688.812	268.606.056
120	Alue Teungoh	Panga	262.980.279	9.840.853	272.821.132
121	Babah Ceupan	Panga	202.306.109	7.570.395	209.876.504
122	Tuwi Eumpeuk	Panga	230.616.487	8.629.784	239.246.271
123	Panton Kabu	Panga	201.056.333	7.523.628	208.579.961
124	Tuwi Kayee	Panga	213.727.100	7.997.775	221.724.875
125	Alue Piet	Panga	270.567.566	10.124.773	280.692.339
126	Ujong Muloh	Indra Jaya	286.774.368	10.731.240	297.505.608
127	Janguet	Indra Jaya	241.133.321	9.023.329	250.156.650
128	Meunasah Rayeuk	Indra Jaya	243.011.622	9.093.616	252.105.238
129	Mukhan	Indra Jaya	243.741.619	9.120.933	252.862.552
130	Meunasah Teungoh	Indra Jaya	210.818.660	7.888.939	218.707.599
131	Meunasah Tutong	Indra Jaya	244.959.910	9.166.522	254.126.432
132	Babah Dua	Indra Jaya	270.205.953	10.111.242	280.317.195
133	Alue Mie	Indra Jaya	241.616.407	9.041.406	250.657.813
134	Teumareum	Indra Jaya	342.310.023	12.809.412	355.119.435
135	Kuala	Indra Jaya	302.607.773	11.323.734	313.931.507
136	Meudhang Ghon	Indra Jaya	229.428.868	8.585.343	238.014.211
137	Kareung Ateuh	Indra Jaya	261.813.720	9.797.200	271.610.920
138	Keude Unga	Indra Jaya	276.450.757	10.344.925	286.795.682
139	Ceunamprong	Indra Jaya	293.388.361	10.978.739	304.367.100
140	Patek	Darul Hikmah	253.406.284	9.482.590	262.888.874
141	Gampong Baro Patek	Darul Hikmah	244.074.998	9.133.408	253.208.406
142	Blang Dalam	Darul Hikmah	251.564.290	9.413.661	260.977.951
143	Pajar	Darul Hikmah	278.446.581	10.419.610	288.866.191
144	Reuntang	Darul Hikmah	245.803.001	9.198.071	255.001.072
145	Cot Pange	Darul Hikmah	221.841.540	8.301.421	230.142.961
146	Arongan	Darul Hikmah	222.158.499	8.313.282	230.471.781
147	Paya Santeut	Darul Hikmah	221.963.552	8.305.987	230.269.539
148	Krueng Tho	Darul Hikmah	252.054.303	9.431.998	261.486.301
149	Panton Krueng	Darul Hikmah	212.559.249	7.954.073	220.513.322
150	Alue Gajah	Darul Hikmah	228.682.335	8.557.407	237.239.742
151	Sayeung	Darul Hikmah	222.755.551	8.335.624	231.091.175
152	Gunong Cut	Darul Hikmah	251.999.079	9.429.931	261.429.010
153	Ujong Rimba	Darul Hikmah	270.178.961	10.110.231	280.289.192
154	Lamteungoh	Darul Hikmah	254.482.270	9.522.853	264.005.123
155	Gampong Baro Lamteungoh	Darul Hikmah	291.230.014	10.897.972	302.127.986
156	Babah Dua	Darul Hikmah	266.330.536	9.966.222	276.296.758
157	Masen	Darul Hikmah	238.759.606	8.934.503	247.694.109
158	Teupin Asan	Darul Hikmah	219.609.673	8.217.903	227.827.576

2.5 p

NO	NAMA GAMPONG	NAMA KECAMATAN	ADG DAU	ADG DBH	JUMLAH PAGU ADG PER- GAMPONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
159	Pulo Tinggi	Pasie Raya	210.187.542	7.865.323	218.052.865
160	Alue Krueng	Pasie Raya	218.526.706	8.177.378	226.704.084
161	Pasi Teubee	Pasie Raya	317.173.461	11.868.789	329.042.250
162	Timpleung	Pasie Raya	223.490.129	8.363.112	231.853.241
163	Krueng Beukah	Pasie Raya	215.888.999	8.078.674	223.967.673
164	Tuwi Kareung	Pasie Raya	319.214.134	11.945.152	331.159.286
165	Lhok Guci	Pasie Raya	240.848.052	9.012.654	249.860.706
166	Tuwi Peuriya	Pasie Raya	254.573.264	9.526.258	264.099.522
167	Sarah Raya	Pasie Raya	258.676.965	9.679.821	268.356.786
168	Alue Jang	Pasie Raya	260.415.509	9.744.878	270.160.387
169	Ceuraceu	Pasie Raya	218.547.263	8.178.147	226.725.410
170	Alue Punti	Pasie Raya	215.977.492	8.081.985	224.059.477
171	Bintah	Pasie Raya	239.258.020	8.953.154	248.211.174
172	Buket Keumuneng	Pasie Raya	204.822.387	7.664.640	212.487.027
JUMLAH			45.057.438.400	1.686.071.900	46.743.510.300



